

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

A. Siti Soetami S.H . *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Dory Reiling, 2018, *Teknologi Untuk Keadilan*, PT. Alumni, Bandung.

Dwi Putri Cahyawati, SH., MH . 2011. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 3.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Golub, Stephan. 2003. *Beyond Rule of Law Orthodoxy : The Legal Empowerment Alternative*, “*Rule of Law series, Democracy and Rule of Law Project*, Number 41, 2003

Hadjon, PM., Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, *Pidato* diucapkan dalam peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 1994.

Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, ed. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Ishaq, H.. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta

Littlejohn, Stephen W & Karen A.Foss. 2009. *Teori Komunikasi*, edisi 9, Jakarta: Salemba, 2009

Marzuki, Peter Mahmud, *Op.cit.*, halaman 141.

Mustofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Nina Winangsih Syah, 2014, *Komunikasi Peradaban*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Peter Salim dan Yenny Salim, 2020, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Perss.
- Rhenald Kasali, 2017, Disruption, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rimdan. 2012 . *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta:Kencana.
- Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saebani, Beni A. (2007). *Sosiologi Hukum*. Cet. I, Bandung : Pustaka Setia.
- Soemitro,Ronny Hanitiyo. 1990 . *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo,2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yohyakarta, Yogyakarta Liberty
- Sururi, Ramdani W. (2018). *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*. LP2M: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, halaman 133 – 134
- Tjandra ,Riawan W. 2011 . *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi* . Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- Van Apeldoorn, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wiyono, R .2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Achmad Edi Subiyanto Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *'ADALAH*, 4(1).
- Atikah, Ika. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Proceding-Open Siciety Conference*.

- Booklet Mahkamah Agung. (2019). e-litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi.
- Fuadah, A. T. (2015). *Bunga Rampai Teori-Teori Hukum*. Bandung : Sahifa.
- M. Hatta Ali, 2019, launching e- litigasi di Mahkamah Agung RI, Jurnal DANDAPALA, V(31) / 80.
- Juanda Nawawi, Membangun Kepercayaan dalam Membangun Good Governance, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 hal 19-29
- Kramer, R.M and T.R. Taylor (1995). *Trust In Organizations ; Prontiers of Theozy an Research*, Thousan d Oaks, Calef, Sage : New York.
- Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. In Conference On Communication and News Media Studies (Vol. 1).
- Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP). (2014). *Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI*.
- Mahkamah Agung RI. (2010). Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung RI: Jakarta.
- Majalah Peradilan Agama Edisi 16, Desember 2019
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peri K. Blind (2006). *Building Trust in Goverment in The Twenty First Century ; Review of Litrature and Emerguing Is swes* : Vienna, Australia.
- Praja, J. S. (2009). *Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*. Bandung : Pasca UIN Sunan Sunan Gunung Djati.
- Rahmawati, Diana, (2008, April). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 5 (1).
- Reiling, Dory. (2009). *Technology for Juctice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*. Leiden: Leiden University Press.

- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80- 100.
- Slamet Mulyana, Leili Kurnia Gustini , Komunikasi Publik Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Dalam Penanganan Human Trafficking di Kabupaten Indramayu, *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal Volume III*, 2016, Universitas Bandar Lampung., hal 112
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susanto, Y. A., Kania, D., & Burhanuddin, H. (2018). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 175-190.
- Syahr, Z. H. A. (2020, April). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-3).
- Tanpa Nama, “*courtrecords electrnic-filling-cmecf*.”, *uscourts.gov*, diakses 27 Maret 2021
- Tanpa Nama, “*courtrecords find-case-pacer* ”, *uscourts.gov*, diakses 27 Maret 2021.
- Tanpa Nama, “*seputar –ditjen-badilag/di-family-court-of-australia-ini-yang dipelajari para-inovator-pengadilan*”, *badilag.mahkamahagung.go.id*, diakses 28 Maret 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Perubahannya

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahannya
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Perubahannya
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
11. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik